

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
PADA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA  
PEMATANG CENKRING KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROULINA HOPPENY BUTAR BUTAR**

**198520092**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
PADA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA  
PEMATANG CENKRING KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

Oleh:

**ROULINA HOPPENY BUTAR BUTAR**

**198520092**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada  
Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang  
Cengkring Kabupaten Batu Bara

Nama : Roulina Hoppeny Butar Butar

NPM : 198520092

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DISETUJUI OLEH:  
Komisi Pembimbing

<b>Pembimbing I</b>	<b>Pembimbing II</b>
	
Nina Angelia, S.Sos., M.Si	Marlina Deliana, S.AB., M.AB

Mengetahui:

<b>Dekan Fakultas I</b>	<b>Ka. Prodi Administrasi Publik</b>
	
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si	Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL

Tanggal lulus : 22 September 2023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2023

  
Roulina Hoppeny B

198520092

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roulina Hoppeny Butar Butar

NPM : 198520092

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 28 juli 2023

Yang menyatakan



(Roulina Hoppeny Butar Butar)

## ABSTRAK

Akuntabilitas adalah rangkaian wujud dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggung jawab yang baik. Desa Pematang Cengkring sebagai salah satu penerima anggaran BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu, dan yang menjadi permasalahannya adalah kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut masih belum jelas, pemerintah desa kebingungan menentukan KPM. Pemerintah diharapkan mampu memperjelas kriteria penerima BLT sehingga tidak adanya kesalahpahaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BLT dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat program BLT terhadap masyarakat desa Pematang Cengkring. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Mardiasmo 2022 yang terdiri dari komitmen terhadap kejujuran dan legalitas, tanggung jawab proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana semua rumusan masalahnya dipecahkan melalui hasil wawancara, observasi, hasil pengamatan dan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang sesuai kenyataan. Kajian ini menyimpulkan bahwa indikator komitmen terhadap kejujuran dan legalitas sudah efektif, indikator tanggung jawab sudah cukup baik karena pelaksana sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, indikator akuntabilitas Program sudah berjalan dengan baik, indikator akuntabilitas kebijakan sudah cukup baik karena tidak mempersulit perangkat desa dan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Kebijakan, BLT-DD**

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out how the village government realized accountability for BLT management and to find out the obstacles the BLT program had for the people of Pematang Cengkring village. This study uses the Mardiasmo 2022 theory, and was carried out using qualitative methods. This study concludes that the indicators of commitment to honesty and legality are effective, the indicators of responsibility are good because executors understand their respective duties and responsibilities, the indicators of program accountability are running well, the indicators of policy accountability are good because it doesn't make it difficult for KPM when distributing Village BLT-DD.*

**Keywords:** *Accountability, Policy, BLT-DD*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Roulina Hoppeny Butar Butar anak dari Bapak Wilton Bangun Butar Butar dan Ibu Dangsina Br Sitorus. Lahir di Pakam Raya pada 06 April 2001. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 013865 Pakam Raya pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Medang Deras, kemudian di tahun 2016 penulis melanjutkan Sekolah di SMA Negeri 1 Medang Deras, Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis mengikuti Program Merdeka yaitu Kampus Mengajar (KM) di SD Negeri 08 Guntung, Batu Bara, Sumatera Utara selama kurang lebih 5 bulan dari Maret 2022-Juli 2022.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Kasih KaruniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA PEMATANG CENKRING KABUPATEN BATU BARA”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, atas doa yang telah diberikan selama ini.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

4. Ibu Nina Angelia S.Sos.,M.si selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Marlina Deliana S.AB.,M.AB selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Dra.Nurhayati Harahap,MAP selaku sekretaris pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas selama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala desa Pematang Cengkring Bapak Ramli,Bapak Azlan Hasan selaku kepala dusun. Penulis ucapkan terimakasih karena sudah membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Wilton Bangun Butar-Butar dan Ibu Dangsina Br Sitorus yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan semua proses dalam menempuh Pendidikan dan kehidupan.
10. Ketiga saudara kandung penulis Abang,Kakak,Adek yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat penulis Gloria Putri Sihombing yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.

12. Terimakasih kepada teman-teman selama perkuliahan berlangsung yaitu Eva Novianti Muham,Ratih Putri dan Indah Harahap yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini.
13. Seluruh teman stambuk 2019 kelas A1 prodi Administrasi Publik, yang telah berjuang bersama penulis dan memberi banyak pelajaran serta pengalaman berharga selama di Universitas Medan Area.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Medan,16 Mei 2023

Roulina Hoppeny B.

198520092

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Akuntabilitas .....	6
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	6
2.1.2 Tujuan Akuntabilitas.....	8
2.1.3 Tahapan Akuntabilitas .....	10
2.1.4 Aspek-aspek Akuntabilitas .....	11
2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	11
2.2 Pengelolaan .....	12
2.3 Alokasi Dana Desa .....	14
2.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	15
2.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai .....	15
2.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan BLT DD .....	18
2.4.3 Kriteria Calon Penerima BLT DD .....	20
2.4.4 Tujuan Bantuan Langsung Tunai .....	21
2.5 Penelitian Terdahulu .....	22
2.6 Kerangka Berpikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	26
3.2.2 Waktu Penelitian .....	27

3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Informan Penelitian.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Gambaran Umum Desa Pematang Cengkring .....	35
4.1.2 Visi dan Misi Desa Pematang Cengkring .....	36
4.1.3 Struktur Pemerintah Desa Pematang Cengkring.....	37
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Program BLT di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.....	42
4.2.2 Faktor Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara ....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	27
Tabel 3.4 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pematang Cengkring.....	36
Tabel 4.2 Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2022 .....	45
Tabel 4.3 Laporan Penerimaan BLT Januari-Maret 2022 .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Pematang Cengkring .....	41
Gambar 4.2 Mekanisme Penerima BLT DD Pematang Cengkring .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	65
Lampiran 2 Nama-nama Masyarakat Penerima BLT .....	67
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	69
Lampiran 4 Surat Pengantar Riset Fakultas .....	71
Lampiran 5 Surat Selesai Riset Desa Pematang Cengkring.....	72



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah yang sangat sering di hadapi sebuah negara merupakan kemiskinan. Untuk itu pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, dimana salah satu nya adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan untuk masyarakat miskin yang bersumber dari dana desa, program bantuan langsung tunai ini di berikan pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih menjadi pro dan kontra. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Dalam Permendes 6/2020 ini juga dijelaskan tegas bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang tidak menerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melainkan Orang Miskin Baru (OMB), OMB ini merupakan orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, serta orang yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Awal mula lahirnya BLT merupakan ide dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu 2004 bersama Presiden SBY. Eksekutif mengacu pada Peraturan Perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006. Sampai saat ini program bantuan langsung tunai masih berjalan, realisasi BLT dana desa

pada Tahun 2020 sebesar Rp23,74 triliun yang disalurkan kepada kurang lebih delapan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Mulai April 2020 KPM memperoleh Rp600.000 per bulan selama 3 bulan pertama, kemudian Rp300.000 per bulan untuk 6 bulan berikutnya. Memasuki tahun 2021 kebijakan BLT masih berlanjut. BLT diberikan sebesar Rp300.000 per KPM selama 12 bulan. Dilihat dari progresnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Astera Primanto Bhakti menyebutkan realisasi BLT dana desa relatif rendah di kisaran Rp3,5 triliun atau 22,15%. Di Kabupaten Batu Bara penerima BLT sebanyak 35.800 keluarga penerima manfaat dimana penerima manfaat ini terdiri dari 60% rumah tangga miskin, dan 40% rumah tangga hampir miskin. Sementara khususnya Desa Pematang Cengkring terdapat 210 KK penerima BLT, 60% masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, 10% masyarakat yang tidak memiliki penghasilan, dan 30% masyarakat yang bekerja sebagai karyawan, dalam pelaksanaan program BLT ini diperlukan adanya akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan atasan yang dalam ranah publik, akuntabilitas dibutuhkan untuk mengelola program BLT Dana Desa yang baik. Akuntabilitas adalah rangkaian wujud dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggung jawab yang baik atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan yang sudah ditetapkan secara teratur dan berkelanjutan (Mustofa, 2012). Kemampuan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempertanggung jawabkan besarnya nilai bantuan dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sedangkan dalam hal proses mengatur dana yang diberikan oleh pemerintah

disebut pengelolaan atau mengelolah. Pengelolaan membutuhkan kecakapan dari setiap sumber daya manusia aparat sehingga tidak menimbulkan hal-hal diluar rencana dan kesepakatan. Sehingga dana yang dikelolah tepat sasaran dan memberikan kepuasan kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan hasil survey peneliti ditemukan berbagai masalah dalam akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa yaitu masih terdapat permasalahan dalam data penerima BLT, pemerintah kebingungan menentukan keluarga penerima manfaat dan juga kurangnya keikutsertaan dari masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang diminta.

Dari masalah-masalah yang ditemukan peneliti menggunakan teori (Mardiasmo,2022) tentang dimensi akuntabilitas yang didalamnya terdapat 4 indikator yang setidaknya dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun indikator, peneliti juga mempercayakan beberapa narasumber yang diyakini mengetahui alur dari masalah yang peneliti temukan. Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa akan mudah tercapai apabila penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan lengkap. Aparat desa dituntut untuk bisa menyusun suatu laporan pertanggungjawaban yang baik, mudah dipahami, dan berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pencairan BLT-Dana Desa ditahap selanjutnya bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan diwaktu yang tepat. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai hal, termasuk bagaimana pengelolaan BLT dana desa yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan berbagai masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program BLT di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara?
2. Apa saja hambatan dalam Program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

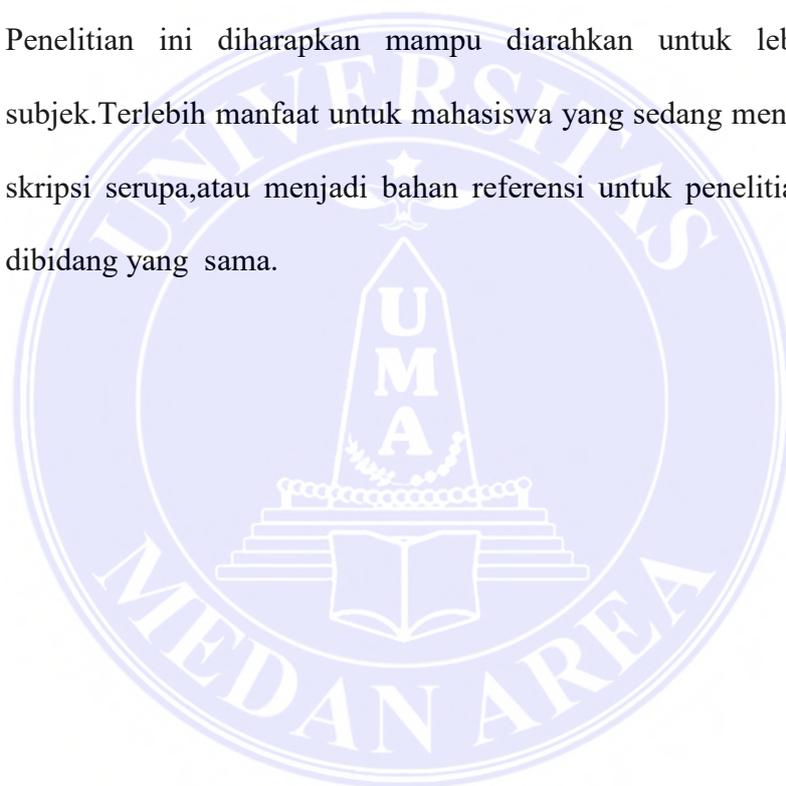
Berdasarkan uraian diatas, adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik dan dapat menambah Ilmu Pengetahuan berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada program BLT di desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Terlebih manfaat untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan topik skripsi serupa, atau menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Akuntabilitas

##### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Nafidah & Anisa, 2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut pertanggung jawaban, atau untuk mempertanggung jawabkan kinerja dan perilaku kepala individu atau unit organisasi. Ini juga meningkatkan akuntabilitas ketika didukung oleh sistem akuntansi yang memberikan informasi yang akurat, andal, tepat waktu, dan dapat dilacak.

Menurut (Katjina, 2021) dari Prinsip Akuntabilitas (Rahmawati, 2015) penyelenggaraan sektor pemerintahan memperhatikan prinsip akuntabilitas ini:

1. Mengelola visi dan misi serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel memerlukan bimbingan dan loyalitas dari pimpinan lembaga dan staf.

2. Sangat penting untuk memiliki sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara teratur sesuai dengan undang-undang saat ini.
3. Harus menunjukkan hasil dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Sangat penting bahwa kita mencapai visi dan misi kita bersama dengan hasil dan manfaat yang dicapai.
5. Harus ada transparansi, kejujuran, inovasi dan objektivitas dalam mendorong perubahan di pemerintahan dalam mengukur kinerja dan hasil pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2022) ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik adalah:

1. Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas.

Akuntabilitas yang adil berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diperlukan ketika menggunakan sumber dana publik.

2. Tanggung jawab proses

Tanggung jawab proses untuk prosedur evaluasi apakah cukup digunakan dalam melakukan tugas termasuk kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem dan prosedur informasi manajemen pengelolaan. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian layanan publik cepat, tanggap, murah. Pemantauan dan inspeksi pada tanggung jawab proses pelaksanaan dibuat dan diperiksa apakah ada biaya tambahan atau biaya lain selain harga.

### 3. Akuntabilitas Program

Program terkait akuntabilitas, menentukan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, pertimbangkan program alternatif untuk hasil yang optimal biaya minimal.

### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas baik pusat maupun daerah di pemerintahan, DPR/DPRD dan masyarakat luas. Pedoman yang diadopsi yaitu indikator tanggung jawab tentang indikator.

Menurut (Rohmah, 2015) akuntabilitas dapat dibagi menjadi empat bidang :

- 1) Operasi : tindakan yang secara ketat mematuhi klausul legalitas aturan dan prosedur.
- 2) Akuntabilitas eksternal yang ditargetkan : pemantauan dan Kontrol oleh institusi eksternal, masyarakat sebagai subjek dan institusi keadilan.
- 3) Standar : standar formal, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
- 4) Mekanisme : pemantauan dan mekanisme eksternal kontrol, manajemen pengaduan dan proses hukum.

#### 2.1.2 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintahan. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sember perubahan masyarakat. (Rahadi & Muslih, 2019) tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan. Menurut (Renyowijoyo, 2008) guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Renyowijoyo, 2008) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

- 1) Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban
- 2) Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas
- 3) Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* diawal setiap tahun anggaran

- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitas pemerintahan dan disampaikan kepada *stakeholders*
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* dia akhir tahun
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik
- 7) Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan
- 8) Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

### 2.1.3 Tahapan Akuntabilitas

Beberapa tahapan akuntabilitas dalam kegiatan organisasi baik pemerintah, maupun swasta baik individu atau kelompok adalah :

- a. Akuntabilitas Personal, yaitu akuntabilitas yang tidak berkaitan dengan pihak manapun dan hanya berkaitan dengan diri sendiri.
- b. Akuntabilitas individu, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan
- c. Akuntabilitas tim, yaitu akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim
- d. Akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas internal dan eksternal di dalam organisasi.
- e. Akuntabilitas *stakeholders*, yaitu akuntabilitas terpisah antara *stakeholders* dan organisasi.

### 2.1.4 Aspek-aspek Akuntabilitas

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor general of biritish* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan public saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada *input* ataupun *output* melainkan kepada *outcome*.

3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

4) Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggungjawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

### 2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000), Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## 2.2 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Poerwadarminta, 2006). Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat

dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Menurut (Dewi, 2011) dalam kegiatan pengelolaan terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, meliputi:

a) Organisasi

Kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, jalinan hubungan kerjasama di antara para pekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

b) Manajemen

Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, mengawasi dengan tujuan agar kerja sama yang telah di tentukan dapat tercapai dengan baik.

c) Komunikasi

Kegiatan menyampaikan informasi dan ide dari seseorang kepada orang lain yang bersifat timbal balik, baik secara formal maupun nonformal.

d) Informasi

Kegiatan menghimpun dan mengolah berbagai keterangan obyektif yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

e) Personalia

Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

f) Perbekalan

Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan peralatan kerja dalam usaha kerja sama agar penggunaan nya efektif dan efisien.

g) Humas

Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kerja sama perusahaan.

### 2.3 Alokasi Dana Desa

Menurut (Hanif Nurcholis,2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam Pasal 5 PP 60/2014 menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya jumlah penduduk,tingkat kemiskinan,luas wilayah,dan tingkat kesulitan geografis. Besaran alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam PP No.47 Tahun 2015 paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Hal itu telah disebutkan pada pasal 96 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD untuk ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang ADD tersebut di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **2.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

### **2.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin. Dalam program BLT merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya (Nurfianti, 2021).

Menurut (Rudi S. Prawiradinata, 2020) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan perekonomian porak poranda, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tunjukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang salah satu keluarganya menderita penyakit yang kronis.

Bantuan langsung tunai dana desa 2022 adalah salah satu program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Desa PDPT. Program BLT tersebut dijalankan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di desa. Program BLT dana desa 2022 dikonfirmasi oleh pemerintah terkait bahwa tahun 2022 BLT akan tetap dijalankan. Anggaran BLT dana desa 2022 dipersiapkan melalui anggaran dana desa. Dilansir dari kemendes.go.id menyatakan bahwa APBN tahun 2022 penggunaan dana desa telah diatur penggunaannya. Sebanyak 40 persen dari dana desa dipersiapkan untuk BLT dana desa 2022. Pembagian dari 40 persen yang dipersiapkan dirincikan 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, sedangkan 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

Walaupun menggunakan dana desa, namun Menteri Desa PDPT mengatakan bahwa pembangunan desa masih tetap dapat dilanjutkan. Penggunaan dana desa dimaksudkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah merasakan dampak dari adanya dana desa. Dilansir dari beberapa laman

resmi media resmi desa menyebutkan bahwa beberapa desa telah melakukan pembagian BLT dana desa tahun 2022. BLT dana desa 2022 dicairkan sebesar Rp 300.000,-setiap tahap.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT dana desa serta penetapan hasil pendataannya :

1) Proses Pendataan

Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun.

2) Penetapan hasil pendataan kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT dana desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT dana desa bulan pertama. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT dana desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT dana desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi

musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT dana desa harus sudah disahkan (Mahin, 2021).

#### **2.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan BLT DD**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

- 1) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020.
- 2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal

24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/20119 tentang pengelolaan Dana Desa. Peraturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 7) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- 8) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa.

Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 juga mengatur penggunaan Dana Desa tahun 2022. Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, diatur tata cara penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program jaminan sosial yang memberikan bantuan tunai langsung ke desa sebesar minimal empat puluh persen.

2. Program minimal 2% (dua puluh persen) untuk ketahanan hewan dan pangan;
3. Mendukung pengelolaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dengan minimal 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa masing-masing desa; serta program tambahan yang berfokus pada sektor.
4. Program sektor prioritas lainnya

### 2.4.3 Kriteria Calon Penerima BLT DD

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang tertuang dalam pasal 33. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
- 2) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja.

- 3) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan)
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 5) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- 6) Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan.

Tim pendataan harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa ini dilakukan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong royong.

#### **2.4.4 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Adapun tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga membantu pemulihan ekonomi dengan membantu masyarakat miskin yang terdampak *pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)* terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban masyarakat terutama dalam masa *pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)*.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari penjelasan mengenai kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis dalam memahami teori yang akan digunakan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis :

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	NAMA/JUDUL	TEORI DAN METODE	HASIL	PERBEDAAN
1.	Netti Nababan/Pengaruh Partisipasi Anggaran,Evaluasi Anggaran Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kab.Batu Bara.	Teori yang digunakan yaitu (Mashun, 2009),Istilah akuntabilitas merupakan pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif.	Berdasarkan hasil analisis telah dikemukakan, Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.	Penelitian ini berfokus pada partisipasi anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, Serta berfokus dalam meningkatkan partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran agar terciptanya akuntabilitas.
2.	Shasha Rahma Sari/ Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri	Teori yang digunakan yaitu (Saaty,2012) AHP banyak digunakan pada keputusan yang memiliki banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya serta penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. Metode yang digunakan yaitu Metode AHP.	Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa kondisi disabilitas menjadi prioritas I sebanyak 36 prioritas dan juga prioritas II sebanyak 47 prioritas bagi para responden.	Penelitian ini berfokus pada beragam persepsi mengenai prioritas penerima BLT, Responden masyarakat terhadap kriteria penerima BLT.
3.	Burhanuddin/ Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020	Teori yang digunakan yaitu (Mardalis, 2004: 87) dalam mengumpulkan data dibutuhkan proses yang memperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaknai berasal dari subjek penelitian. Metode yang digunakan yaitu Metode Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan pemerintah desa.	Penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.

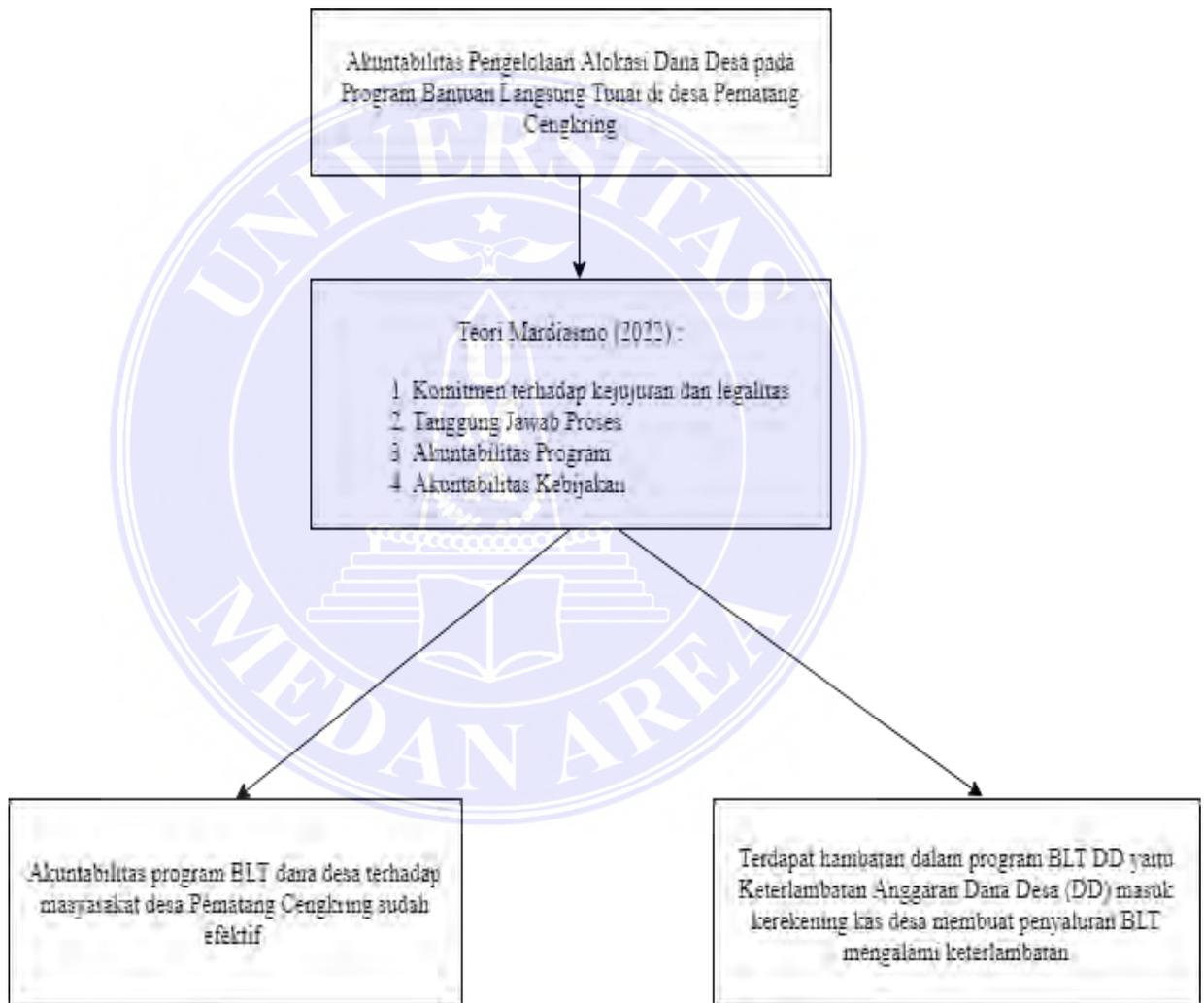
No	NAMA/JUDUL	TEORI DAN METODE	HASIL	PERBEDAAN
4.	Mega Sustra Dewi/ Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu	Teori yang digunakan yaitu Mustofadijaja, (2002:45) Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu periode 2008-2009 sudah berjalan baik. Berdasarkan hasil evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu mencapai angka 66,6% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 65%.Bantuan langsung tunai perlu diterapkannya kriteria penerima bantuan langsung tunai dengan baik kepada masyarakat miskin.	Penelitian ini berfokus pada Jumlah Bantuan Langsung Tunai yang di salurkan ke masyarakat,gambaran umum Bantuan Langsung Tunai dan respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
5.	Daniel Ortega/Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat	Teori yang digunakan yaitu (Abdoellah dkk, 2016:37) Proses kebijakan pemerintah realitanya merupakan tahapan-tahapan, mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi/penilaian kebijakan publik. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.	Hasil Penelitian yaitu komunikasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat dengan meberikan surat undangan, memasang banner/baliho dan melakukan musyawarah,Sumber Daya pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa. Pemerintahan, dua Kepala Dusun dan berserta masing-masing wewenang nya.	Penelitian ini berfokus pada Pelayanan pemerintah desa kepada penerima Bantuan Langsung Tunai,Fasilitas yang dibutuhkan saat melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai, berdasarkan kuantitas dan bidangnya.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Akuntabilitas merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Akuntabilitas dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Akuntabilitas organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi akuntabilitas sejumlah individu dalam organisasi. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi (determinan) akuntabilitas individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori akuntabilitas. Menurut teori Mardiasmo (2022), ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi adalah :

1. Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas
2. Tanggung Jawab proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas kebijakan

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



*Sumber : Dikelola oleh peneliti 2023*

## BAB III

### METEDOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif. Sedangkan dalam penelitian dengan metode kualitatif menurut Menurut (Moleong,2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku,persepsi,motivasi,tindakan secara holistik dan dengan cara deskeipsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui informan-informan peneliti dengan cara observasi,wawancara,survey,dan dokumentasi. Maka dengan penelitian ini peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dan desa dalam program bantuan langsung tunai di desa Pematang Cengkring pekan Kabupaten Batu Bara yang diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek atau tempat untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Cengkring yang terletak di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21258. Alasan Peneliti

memilih lokasi tersebut untuk melihat Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada program bantuan langsung tunai di desa Pematang Cengkring. Selain itu juga, untuk mendapatkan informasi dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada program bantuan langsung tunai di desa Pematang Cengkring kabupaten Batu Bara. Adapun tahapan dan rincian yang akan di lakukan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengambilan Data Penelitian												
5	Penyusunan Skripsi												
6	Seminar Hasil												
7	Perbaikan Skripsi												
8	Sidang Meja Hijau												

*Sumber : Dikelola oleh peneliti 2023*

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, Penelitian ini membutuhkan sumber data yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi pada berbagai jenis data yang dapat di kumpulkan.

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang di peroleh secara langsung dari informan. Informan merupakan seseorang atau kelompok yang dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi beberapa sumber yaitu kajian Pustaka atau buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang mengenai dengan penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada program bantuan langsung tunai di desa Pematang Cengkring kabupaten Batu Bara.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau instansi yang dapat memberikan informasi. Informan adalah Orang- orang dari lokasi penelitian yang mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerja sama, dapat berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk

sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam lagi. Secara alami peneliti dan informan membentuk tiga informan antara lain :

a Informan kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami informasi penting mengenai pokok permasalahan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Bapak Ramli selaku Kepala Desa Pematang Cengkring .

b Informan Utama

Informan utama adalah orang yang terlibat dalam penelitian dan memiliki pengalaman langsung dengan subjek yang dihadapi. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu Keluarga Bapak Sumber Sitorus, Bapak Edi Setiawan dan Ibu Suriati yang menerima bantuan dari program BLT di lokasi penelitian ini.

c Informan tambahan

Informan tambahan adalah orang yang benar benar memberikan informasi dan data meskipun tidak ikut serta secara langsung dalam subjek yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Bapak Azlan Hasan selaku Kepala Dusun Desa Pematang Cengkring.

**Tabel 3.4****Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Ramli	Kepala Desa	Informan Kunci
2.	Bapak Sumber Sitorus	Masyarakat	Informan Utama
3.	Bapak Edi Seitiawan	Masyarakat	Informan Utama
4.	Ibu Suriati	Masyarakat	Informan Utama
5.	Bapak Azlan Hasan	Kepala Dusun	Informan Tambahan

*Sumber : dikelola oleh peneliti 2023*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Maryadi dkk,2010) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang mungkin diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut (Sugiyono,2005) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Menurut Sugiyono (2010:145) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dilakukan dengan pengamatan dan ingatan. Dengan metode observasi diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode observasi dimana penelitian sebagai partisipasi artinya adalah peneliti ikut terlibat, dalam melakukan pencatatan data, observasi bukanlah sekedar mencatat tapi juga mengadakan observasi yang reliabilitasnya dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Peneliti dalam penelitian ini akan mengamati Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Menurut Sugiyono (2015), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan/ cara melihat, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada empat komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut (Moleong, 2004), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data".

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Langkah-langkah analisis data menurut (Miles dan Huberman,1992) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- 2) Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- 3) Penyajian data, Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2018) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

- 4) Penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Pemerintah desa Pematang Cengkring melaksanakan program BLT ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah tepat sasaran dimana penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat yang termasuk kategori orang miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pemerintah desa Pematang Cengkring dalam melaksanakan program BLT kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 , program BLT di berikan kepada masyarakat miskin dan dilakukan secara terbuka. Namun ada satu indikator yang masih belum memenuhi yaitu indikator Akuntabilitas Kebijakan dimana rendahnya pendidikan masyarakat sering menjadi hambatan bagi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi bantuan langsung tunai sementara masyarakat desa pematang cengkring selalu berpikir bahwa pemerintah desa tidak adil dalam menyampaikan program BLT ini.

2. Faktor penghambat dalam program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat desa Pematang Cengkring yaitu keterlambatan Anggaran dana desa yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) dan Pelaksanaan lapangan kurang efektif dalam sosialisai program BLT .

## 5.2 Saran

Adapun Saran yang peneliti sampaikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai perlu adanya kerja sama antar pemerintah desa, sumber daya manusia atau masyarakat, transparansi dan tepat sasaran serta pengetahuan tata kelola keuangan yang memadai agar tidak menimbulkan tindakan yang menyimpang atas dana yang dikelola.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar skripsi ini dapat lebih sempurna serta dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. (2015). *Ombudsman dan akuntabilitas publik*. De La Macca
- Grafika,R.S. (2017).*Peraturan Lengkap Desa*. Jakara Timur: Sinar Grafika
- Hanif Nurcholis 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Irawan,N. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Jaya, M. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori,Penerapan,dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Maryadi dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Mustofa, S. (2020). *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke*. Jakarta: Guepedia.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. S. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT.Bumi Aksara .
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

### SKRIPSI

- Bukel. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Katjina, H. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau*
- Nawawi, Hadari dan Martini, H. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.
- Rahadi, R., & Muslih, M. (2019). *Model Media Sosial di Sektor Publik..*
- Rohmah, Y. A. (2015). *Analisis akuntabilitas program keluarga harapan*.

## JURNAL

- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA. *Ijlil*, 1(3). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>
- Mahin, M. (2021). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 19(1), 69–76. <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.480>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nurfianti, A. (2021). transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani kabupaten Takalar. *Digilibbadmin.Unismuh.Ac.Id*, July, 1–23.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Wahyuandari, W., & Marlina, M. (2021). Tantangan Akuntabilitas Penyaluran BLT Dana Desa Dalam Darurat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 3025–3040.

## UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Keuangan No.222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Perintah Presiden nomor 12 tahun 2005
- UU Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021 tentang Besaran BLT DD
- UU Pasal 1 Angka 28 Permendes
- UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1:

#### PEDOMAN WAWANCARA

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara

Wawancara ini akan dilakukan berdasarkan teori akuntabilitas dari Mardiasmo (2022) yang memiliki 4 (empat) indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas
2. Tanggung Jawab proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Berikut informasi dari desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara.

#### 1. Informan kunci

##### **Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas**

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program BLT DD di desa Pematang Cengkring?
- b. Apakah program BLT masih berjalan hingga saat ini?
- c. Bagaimana Penyaluran BLT apakah sudah tepat sasaran?

##### **Tanggung Jawab Proses**

- a. Bagaimana pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa khusus pelaksanaan atau pembagian BLT DD?
- b. Menurut Bapak apakah BLT sudah tepat sasaran?

##### **Akuntabilitas Program**

- a. Apakah Pelaksanaan Program BLT sudah sesuai aturan?
- b. Dalam Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban khusus dana desa dalam program BLT-DD masalah apa yang sering ditemui?

##### **Akuntabilitas Kebijakan**

- a. Resiko apa saja yang sudah ditemui selama berjalan nya program BLT ini?
- b. Bagaimana jika terjadi kekurangan dana desa dalam Pelaksanaan program BLT?

## 2. Informan Utama

### **Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas**

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program BLT di desa Pematang Cengkring ini sudah tepat?
- b. Apakah program BLT masih berjalan hingga saat ini?

### **Tanggung Jawab Proses**

- a. Bagaimana pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa khusus pelaksanaan atau pembagian BLT DD?
- b. Menurut Bapak apakah BLT sudah tepat sasaran?

### **Akuntabilitas Program**

- a. Apakah Pelaksanaan Program BLT sudah sesuai aturan?

## 3. Informan Tambahan

### **Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas**

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program BLT DD di desa Pematang Cengkring?
- b. Apakah program BLT masih berjalan hingga saat ini?
- c. Bagaimana Penyaluran BLT apakah sudah tepat sasaran?

### **Tanggung Jawab Proses**

- a. Bagaimana pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa khusus pelaksanaan atau pembagian BLT DD?
- b. Menurut Bapak apakah BLT sudah tepat sasaran?

### **Akuntabilitas Program**

- a. Apakah Pelaksanaan Program BLT sudah sesuai aturan?
- b. Dalam Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban khusus dana desa dalam program BLT-DD masalah apa yang sering ditemui?

### **Akuntabilitas Kebijakan**

- a. Resiko apa saja yang sudah ditemui selama berjalan nya program BLT ini?
- b. Bagaimana jika terjadi kekurangan dana desa dalam Pelaksanaan program BLT?

**Lampiran 2:****Nama-nama Masyarakat Penerima BLT**

No.	Nama Lengkap	Dusun	Pekerjaan
1.	Riski Fitria	Simpang Durian	Mengurus rumah tangga
2.	Sumber Sitorus	Simpang Durian	Petani
3.	Ahmad Bakri	Simpang Durian	Wiraswasta
4.	Erawati	Simpang Durian	Mengurus rumah tangga
5.	Dahniar Pardede	Simpang Durian	Petani
6.	Syahfaruddin	Simpang Durian	Nelayan
7.	Saddah	Simpang Durian	Petani
8.	Mila Senja	Simpang Durian	Petani
9.	MHD.Fauzi Saragih	Simpang Durian	Petani
10.	Hadli Sundung S	Simpang Durian	Wiraswasta
11.	Ramlah	Simpang Durian	Mengurus rumah tangga
12.	Salmiah	Tengah	Mengurus rumah tangga
13.	Siti Aisyah	Tengah	Mengurus rumah tangga
14.	Rombang Rajagukguk	Tengah	Mengurus rumah tangga
15.	Aliando Karo Karo	Tengah	Mengurus rumah tangga
16.	Maimunah	Pemata Jaya	Mengurus rumah tangga
17.	Misdiono	Pemata Jaya	Wiraswasta
18.	Asiyah	Pemata Jaya	Mengurus rumah tangga
19.	Kamaruddin MZ	Pemata Jaya	Wiraswasta
20.	Riduan	Jaya	Wiraswasta
21.	Siti Jahara	Jaya	Wiraswasta
22.	Rukiah	Jaya	Mengurus rumah tangga
23.	Yahya	Jaya	Wiraswasta
24.	Syahrial	Jaya	Wiraswasta
25.	Tukarman Purba	Jaya	Wiraswasta
26.	MHD.Yunus	Jaya	Wiraswasta
27.	MP.Aritonang	Jaya	Wiraswasta
28.	Suhendra	Jaya	Wiraswasta
29.	Nurainun	Jaya	Wiraswasta
30.	Wakini	Jaya	Mengurus rumah tangga
31.	Maimunah	Jaya	Mengurus rumah tangga
32.	MHD.Iqbal	Jaya	Wiraswasta
33.	Nurmala Tanjung	Blok X	Mengurus rumah tangga
34.	Rohani	Blok X	Mengurus rumah tangga
35.	Ilyas	Blok X	Wiraswasta
36.	Rosmawarni	Blok X	Mengurus rumah tangga
37.	Tomi Anggara	Blok X	Nelayan
38.	Riduan	Blok X	Wiraswasta
39.	Heri Purnomo	Blok X	Wiraswasta
40.	Ali Usman	Blok X	Nelayan
41.	Rodiah	Jaya Baru	Mengurus rumah tangga
42.	Ruslan	Jaya Baru	Wiraswasta
43.	Mariatun	Jaya Baru	Mengurus rumah tangga
44.	Jufri	Jaya Baru	Wiraswasta
45.	M.Yunus	Jaya Baru	Wiraswasta
46.	Hermansyah	Jaya Baru	Wiraswasta
47.	Salmiah	Jaya Baru	Mengurus rumah tangga
48.	Saprijal	Jaya Baru	Wiraswasta
49.	Rahmah	Jaya Baru	Mengurus rumah tangga
50.	Samsul Bahari	Jaya Baru	Wiraswasta
51.	Maimunah	Jaya Baru	Mengurus rumah tangga

No.	Nama Lengkap	Dusun	Pekerjaan
52.	Nurasiah	Blok X Baru	Mengurus rumah tangga
53.	MHD. Taher	Blok X Baru	Wiraswasta
54.	Sukri	Blok X Baru	Wiraswasta
55.	Bainuddin	Blok X Baru	Wiraswasta
56.	Anijar	Blok X Baru	Wiraswasta
57.	MHD. Yusuf	Blok X Baru	Wiraswasta
58.	Dedy Wahyudi	Blok X Baru	Wiraswasta
59.	Aisah	Blok X Baru	Mengurus rumah tangga
60.	Azlan	Blok X Baru	Wiraswasta
61.	Supiah	Blok X Baru	Mengurus rumah tangga
62.	Yanti	Blok X Baru	Mengurus rumah tangga
63.	Ahmad MS	Blok X Baru	Wiraswasta
64.	Sopiah	Blok X Baru	Mengurus rumah tangga
65.	Ismail	Blok X Baru	Wiraswasta
66.	Suartono	Blok X Baru	Petani
67.	Reno Efendi	Blok X Baru	Wiraswasta
68.	Suep	Blok X Baru	Wiraswasta
69.	Jumadi	Blok X Baru	Wiraswasta
70.	Muhammad Yusuf	Blok X Baru	Petani
71.	Ismail	Blok X Baru	Wiraswasta
72.	Zulkifli Damanik	Blok X Baru	Wiraswasta
73.	Suriati	Antara	Mengurus rumah tangga
74.	Jumikem	Antara	Wiraswasta
75.	Welas	Antara	Mengurus rumah tangga
76.	Sarjumin	Antara	Mengurus rumah tangga
77.	Miskun	Antara	Wiraswasta
78.	Andre Fadri	Antara	Petani
79.	Sadikun	Antara	Wiraswasta
80.	Toiba	Antara	Wiraswasta
81.	Saparuddin	Antara	Wiraswasta
82.	Mulyadi	Antara	Wiraswasta
83.	Syaelan	Antara	Wiraswasta
84.	Pujiono	Antara	Wiraswasta
85.	Edi Setiawan	Antara	Wiraswasta
86.	Waginem	Mekar Jaya	Wiraswasta
87.	Linda Wati Br Damanik	Mekar Jaya	Mengurus rumah tangga

### Lampiran 3:

#### Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Kepala Desa Pematang Cengkring



Wawancara bersama Kepala Dusun



Wawancara bersama penerima program BLT DD  
Pematang Cengkring



Foto masyarakat saat menerima Bantuan Langsung Tunai  
Dana Desa (BLT-DD)

## Lampiran 4:

### Surat Pengantar Riset Fakultas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 366/FIS.2/01.10/II/2023 02 Maret 2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,  
**Kepala Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara  
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Roulina Hoppeny Butar-Butar  
N P M : 198520092  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara**, dengan judul Skripsi "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**

## Lampiran 5:

### Surat Selesai Riset Desa Pematang Cengkring

 **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**KECAMATAN MEDANG DERAS**  
**KANTOR KEPALA DESA PEMATANG CENKERING**  
**Jln. M. Siddik No. 49 Kode Pos 21258**

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAKAN PENELITIAN**  
Nomor : 474 / 179 / PC / 2023

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : R A M L I  
**J a b a t a n** : Kepala Desa Pematang Cengkring

2. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROULINA HOPPENY BUTAR-BUTAR  
NPM : 19520092  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Sekolah/Univ : Universitas Medan Area

3. Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, untuk memperoleh Data dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian yang berjudul: “ AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA PEMATANG CENKERING KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA “

4. Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Cengkring, 13 Maret 2023  
KEPALA DESA PEMATANG CENKERING

  
**R A M L I**